

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Hubungan internasional pada mulanya berasal dari kontak dan interaksi diantara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman isu-isu Internasional mengalami perkembangan, negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu Internasional diluar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan.

Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional, sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup terhadap dunia luar (Perwita dan Yani, 2005: 3-4).

Menurut J.C. Johari, hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (*non states actors*) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara. Pemikiran Hubungan Internasional

dipengaruhi oleh subjek-subjek akademik lainnya seperti filsafat, sejarah, hukum, sosiologi, atau ekonomi.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam transisi, hal itu berdampak pada situasi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional (Perwita dan Yani, 2005: 7-8).

Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang bersifat dinamis yang disebabkan oleh dinamika yang terjadi dalam sistem internasional itu sendiri. Dalam hubungan internasional, hubungan atau interaksi antar negara merupakan hal yang paling mendasar untuk dipahami. Interaksi-interaksi antar negara ini dilakukan setiap negara melalui (state actor) dan (non-state actor) akibat banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia internasional yang disebut pola interaksi hubungan internasional yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional dan menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain (Rudy, 2003:2).

Adapun beberapa konsep umum yang terdapat di dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut:

1. Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.
2. Kerjasama Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan Kerjasama Internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.
3. Analisis Sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita dan Yani, 2005: 29-34).

Dalam penelitian ini, hubungan internasional berkaitan dengan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Singapura dalam upaya membangun ekonomi digital di masing-masing negara. Interaksi antar aktor ini yang kemudian membuat peneliti menggunakan teori-teori hubungan internasional dalam menjelaskan penelitian.

Dalam bukunya, Jackson dan Sorensen mengatakan, bahwa:

“Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya.” (Jackson dan Sorensen, 2013: 34).

### **2.1.2 Kerjasama Bilateral**

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk memenuhi kepentingan kedua negara dan untuk mencapai tujuan bersama. Bilateralisme berpacu pada relasi politik dan budaya yang dilakukan oleh dua negara, contohnya :

1. Penandatanganan atau perjanjian.
2. Tukar menukar Duta Besar.
3. Kunjungan kenegaraan.

Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya, pendidikan dan ekonomi antar dua negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral. Alternatif dari hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semanya sendiri (*freewill*) (Rudy, 2002: 127).

Kerjasama dapat berjalan melalui berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan interaksi berbentuk kerjasama terjadi pada dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Model kerjasama lainnya dilakukan oleh masing-masing negara yang diwadahi organisasi dan perjanjian internasional.

Beberapa organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan bahwa kerjasama yang berlangsung diantara negara anggota organisasi tersebut dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Kerjasama yang dilakukan antar pemerintah dua negara yang berdaulat dalam rangka mencari penyelesaian bersama terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, perjanjian, dan lain sebagainya disebut sebagai kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi.

Pola kerjasama bilateral meliputi proses:

1. Respon atau kebijakan aktual dari negara yang menginisiasi.
2. Persepsi dari respon tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Aksi balik dari negara penerima keputusan.
4. Persepsi oleh pembuat keputusan dari negara penginisiasi.

(Perwita dan Yani, 2005:42).

Isu utama dalam kerjasama internasional dilihat berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, sosial dan budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005: 33-34).

Jadi, kerjasama tidak dapat terjadi apabila suatu negara dapat mencapai tujuannya sendiri. Sehingga yang terasa bahwa kerjasama akan tercipta, karena adanya ketergantungan dari masing-masing negara untuk mencapai kepentingan internalnya. Menurut Teuku May Rudy dalam buku *Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin* mengatakan bahwa, dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut (Rudy, 2002: 125).

Kishan S. Rana mengatakan bahwa kerjasama bilateral : “Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara” (Rana, 2002: 15-16).

Adapun beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi, dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai

kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006: 6).

### **2.1.3 Kepentingan Nasional**

Kepentingan Nasional merupakan konsep yang paling dikenal luas di kalangan para penstudi hubungan internasional dan politik internasional baik itu pengamat aliran tradisional atau saintifik. Hal ini terjadi selama negara bangsa (*Nation State*) masih merupakan aktor yang utama dalam hubungan internasional. Semua ahli agaknya sepakat bahwa determinan utama yang menggerakkan negara-negara menjalankan hubungan internasional (*International Relation*) adalah kepentingan nasionalnya (Rudy, 2002: 60).

Kepentingan nasional merupakan sebuah dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu pemerintahan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu:

“Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara” (Rudy, 2002: 116).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau state berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep “*power*” kepentingan “*interest*” didefinisikan ke dalam terminologi power (Sitepu, 2011: 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu “*power*” yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

Sedangkan Coulombis dan Wolfe membagi unsur-unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan:

1. *Tangible elements* (yang konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur)

- a. Populasi (jumlah penduduk)
- b. Luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik atau geostrategik)
- c. Sumber alam dan kapasitas industri
- d. Kapasitas produksi pertanian

e. Kekuatan dan mobilitas militer

2. *Intangible elements* (tidak dapat diukur)

a. Kepemimpinan nasional (leadership and personality)

b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi-birokrasi

c. Tipe dan gaya pemerintahan

d. Keterpaduan masyarakat (social cohesiveness)

e. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan

f. Peristiwa-peristiwa tertentu (Rudy, 2002: 114).

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapaiannya akan tujuan-tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional. Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan kontribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.

3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lainlain.
6. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Wolfe, 2004: 110).

Menurut para penganut realis yang mendefinisikan dari kepentingan nasional adalah sebagai berikut:

“Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (survival) dalam politik internasional” (Perwita & Yani, 2005: 35)

#### **2.1.4 Globalisasi**

Istilah globalisasi sering diberi arti yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga disini perlu penegasan lebih dulu. Ahmed dan Doman (Azizy, 2004: 19) memberi batasan bahwa ‘Globalisasi pada prinsipnya mengacu pada perkembangan-perkembangan yang cepat di dalam teknologi komunikasi, transfortasi, yang bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh (menjadi hal-hal)

yang bisa dijangkau dengan mudah'. Istilah yang saat ini dikenal yaitu *electronic proximity*, artinya kedekatan elektronik, dimana jarak tidak lagi menjadi hambatan yang berarti untuk menjalin komunikasi antarwarga di belahan penjuru dunia ini. Hal ini berimplikasi kepada keterbukaan antarnegara untuk dimasuki berbagai informasi yang disalurkan secara kesinambungan melalui teknologi komunikasi dan informasi (*information technology*), seperti internet, televisi atau media elektronik lainnya.

“Masyarakat di dunia, dari aspek budaya, terlihat kemajuan keseragaman. Media massa, terutama televisi mengubah dunia menjadi sebuah dusun global (*global village*). Informasi dan gambar peristiwa yang terjadi di tempat yang sangat jauh dapat ditonton jutaan orang pada waktu bersamaan”. (Martono, 2012:97)

“Teori globalisasi muncul sebagai akibat dari serangkaian perkembangan internal teori sosial, khususnya reaksi terhadap perspektif terdahulu seperti teori modernisasi” (Ritzer dan Goodman, 2010: 587).

“Globalisasi kultur dapat dilihat sebagai ekspansi transnasional dari kode dan praktik bersama (homogenitas), atau sebagai proses dimana banyak input kultur lokal dan global saling berinteraksi untuk menciptakan semacam perpaduan yang mengarah ke pencangkakan kultur (heterogenitas), *trend* menuju homogenitas sering kali diasosiasikan dengan imperialisme kultural atau dengan kata lain, bertambahnya pengaruh internasional terhadap kultur tertentu” (Ritzer dan Goodman, 2010: 588)

“Globalisasi memperlihatkan pasar kapitalis dan seperangkat relasi sosial dan aliran komoditas, kapital, teknologi, ide-ide, bentuk-bentuk kultur, dan penduduk yang melewati batas-batas nasional via jaringan masyarakat global. Transmutasi teknologi dan kapital bekerja sama menciptakan dunia baru yang mengglobal dan saling terhubung. Revolusi teknologi yang menghasilkan jaringan komunikasi komputer, transportasi, dan pertukaran merupakan pra-anggapan (*presupposition*) dari ekonomi global, bersama dengan perluasan dari sistem pasar kapitalis dunia yang menarik lebih

banyak area dunia dan ruang produksi, perdagangan, dan komunikasi ke dalam orbitnya” (Ritzer dan Goodman, 2010: 590).

Malcom Waters, seorang professor sosiologi dari Universitas Tasmania, berpendapat, globalisasi adalah sebuah proses social yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang.

Princeton N Lyman, mantan duta besar AS di Afrika Selatan, berpendapat bahwa globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara Negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan.

Selo Soemardjan, bapak Sosiologi Indonesia, berpendapat bahwa Globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama (staffnew.uny.ac.id/upload/131405899/pendidikan/EKO.+PEMB+--+Globalisasi.pdf diakses pada 19 Juli 2019).

### **2.1.6 Ekonomi Digital**

Definisi Digital Economy versi Encarta Dictionary adalah “*Business transactions on the Internet: the marketplace that exists on the Internet*“. Pengertian Digital Economy lebih menitikberatkan pada transaksi dan pasar yang terjadi di dunia internet. Pengertian yang lebih luas dari sekedar transaksi atau pasar adalah *New Economy* yang menurut PC Magazine adalah “*The impact of information technology on the economy*“. Pengertiannya lebih menonjolkan pada penerapan teknologi informasi pada bidang ekonomi.

Ekonomi digital didefinisikan oleh Amir Hartman adalah :

“Sebuah tempat virtual dimana bisnis dijalankan, nilai dibuat dan dipertukarkan, transaksi berjalan dan matangnya hubungan satu-ke-satu dengan menggunakan internet dan TIK sebagai media”.

Menurut Dalle (2016) sejarah ekonomi dunia telah melalui empat era dalam hidup manusia yaitu era masyarakat pertanian, era mesin pasca revolusi industri, era perburuan minyak, dan era kapitalisme korporasi multinasional. Empat gelombang ekonomi sebelumnya berkarakter eksklusif dan hanya bisa dijangkau oleh kelompok elite tertentu. Gelombang ekonomi digital hadir dengan topografi yang landai, inklusif, dan membentangkan ekualitas peluang. Karakteristik ini memiliki konsep kompetisi yang menjadi spirit industri yang dengan mudah terangkat oleh para pelaku startup yang mengutamakan kolaborasi dan sinergi. Karena itu pula ekonomi digital merupakan ‘*sharing economy*’ yang mengangkat banyak usaha kecil dan menengah untuk memasuki bisnis dunia.

Konsep ekonomi digital lainnya adalah digitalisasi informasi dan infrastruktur TIK. Konsep ini sering digunakan untuk menjelaskan dampak global teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya pada internet, tetapi juga pada bidang ekonomi. Konsep ini menjadi sebuah pandangan tentang interaksi antara perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi dan dampaknya pada ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Ekonomi digital adalah sektor ekonomi meliputi barang-barang dan jasa-jasa saat pengembangan, produksi, penjualan atau suplainya tergantung kepada teknologi digital. Sebuah perkembangan ekonomi digital tidak lepas dari karakteristik/sifatnya yakni adanya penciptaan nilai, produk

berupa efisiensi saluran distribusi, dan struktur berupa terjadinya layanan personal dan sesuai keinginan (Zimmerman, 2000).

Profesor Walter Brenner dari University of St. Gallen, Switzerland menyebutkan bahwa ekonomi digital adalah :

“Penggunaan data secara agresif mengubah model bisnis, memfasilitasi produk dan layanan baru, menciptakan proses baru, menghasilkan utilitas yang lebih besar, dan mengantarkan budaya manajemen baru.” (<https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/technology/articles/mt-what-is-digital-economy.html> diakses pada 19 Juli 2019).

Dalam bukunya I Putu Agus Eka Pratama yang berjudul *E-Commerce, E-Business, dan Mobile Commerce: Teori & Praktek*, terdapat beberapa definisi mengenai *e-commerce*, yaitu sebagai berikut:

1. Kim dan Moon di tahun 1998 menyatakan bahwa *e-commerce* adalah proses untuk mengantarkan informasi, produk, layanan, proses pembayaran, melalui kabel telepon, koneksi internet, dan akses digital lainnya.
2. Baorakis, Kourgiantakis, dan Migdalas di tahun 2002 menyatakan bahwa *e-commerce* merupakan bentuk perdagangan barang dan informasi melalui jaringan internet.
3. Chaffey di tahun 2007 memberikan lagi definisi mengenai *e-commerce*, dengan mempertimbangkan bahwa di tahun 2007 perkembangan teknologi komputer dan jaringan internet telah berkembang pesat dan akan mempengaruhi proses ekonomi.

Pada dasarnya, ekonomi digital merupakan interaksi ekonomi yang pelaksanaannya memanfaatkan teknologi internet. Saat ini, ekonomi digital mendapatkan posisi tersendiri dalam kehidupan sehari-hari.

*E-commerce* atau secara sederhana dikenal sebagai ruang jual beli online menjadi sangat *in* di masyarakat karena para calon konsumen tidak perlu melakukan sebuah pergerakan untuk memperoleh barang yang diinginkan dan dengan duduk di tempat saja seseorang sudah dapat menikmati barang yang diinginkan. Sedangkan bagi pedagang bahwa mereka tidak perlu mencari lokasi tempat berjualan namun dengan sendirinya barang yang dijual akan laku. Hal ini menjadi sangat efektif dan efisien secara ruang dan waktu bagi manusia masa kini yang sangat sibuk.

Teknologi keuangan juga memunculkan cara-cara baru dalam memberikan layanan keuangan di Asia, khususnya dalam memfasilitasi pembayaran dan pinjaman; mempromosikan inklusi keuangan di banyak negara berkembang di Asia. Pinjaman berbasis *Fintech* di Asia mencapai \$ 102,8 miliar pada tahun 2015 sementara proliferasi teknologi semakin meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan memperkuat posisi Asia sebagai pasar pembayaran terbesar di dunia. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digital, jaringan, dan cerdas memungkinkan kegiatan ekonomi modern menjadi lebih fleksibel, gesit, dan cerdas (<https://www.adb.org/news/events/understanding-digital-economy-what-it-and-how-can-it-transform-asia> diakses pada 19 Juli 2019).

Secara umum, terdapat 3 kategori *e-commerce* yang ada di Indonesia yaitu *Online forums and classifieds*, *Marketpalce*, dan *others*. Contoh *Online forums and*

*classifieds* : Kaskus, OLX Indonesia, Jualo, Lamudi, Rumah123, Rumah, Carmudi, Mobil123, Lazada Indonesia, Matahari Mall, Bhinneka, Blibli, Zalora Indonesia, Shopee, Berrybenka, Paraplou, Bobobobo, Tiket, Traveloka, Groupon Indonesia, dan Grivy. Contoh *Marketplace* antara lain, Tokopedia, Bukalapak, Qoo10 Indonesia, Elevenia, Blanja, dan Rakuten Belanja Online. Contoh *Others*, Indonetnetwork, Indo *Trading* (Cosseboom, 2015).

*E-commerce* merupakan proses pembelian, penjualan, atau pertukaran barang, jasa dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Istilah *e-commerce* dapat dilihat dari empat perspektif yang berbeda yaitu :

1. Bila dilihat dari perspektif komunikasi, *e-commerce* adalah penyediaan barang, jasa, informasi atau pembayaran melalui jaringan komputer atau alat elektronik lainnya.
2. Bila dilihat dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* adalah aplikasi dari teknologi dengan tujuan mengotomatisasi transaksi bisnis dan langkah-langkah dalam melaksanakan pekerjaan (*workflow*).
3. Bila dilihat dari perspektif pelayanan, *e-commerce* adalah sebuah alat yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, konsumen, dan manajemen dengan tujuan meminimalisir biaya pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen, dan meningkatkan kecepatan pelayanan konsumen.
4. Bila dilihat dari perspektif *online*, *e-commerce* memungkinkan dilaksanakannya proses jual beli produk dan informasi melalui Internet dan layanan online lainnya (Turban, E, & King, D., 2002).

Pasar e-commerce dianggap sebagai tambang emas yang sangat menggoda bagi sebagian orang yang bisa melihat dan memprediksikan potensi ke depannya. Pertumbuhan ini didukung dengan data dari Menkominfo yang menyebutkan bahwa nilai transaksi e-commerce yang mencapai angka Rp130 triliun pada tahun 2013. Hal tersebut dapat dikatakan angka yang sangat fantastis mengingat bahwa hanya sekitar 7% dari 8 pengguna internet di Indonesia yang pernah melakukan belanja secara online berdasarkan data dari McKinsey (Mitra, 2014).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerjasama internasional dibentuk untuk menjalin suatu hubungan yang erat antar negara. Hubungan yang erat itu akan membentuk suatu proses bantu membantu antar kedua negara dalam bidang apapun, untuk memenuhi kepentingan masing-masing negara karena pada dasarnya tidak ada negara yang mampu hidup sendiri. Disinilah hubungan internasional memiliki peran untuk membentuk suatu ikatan yang harmonis dan mencapai tujuan masing-masing negara. Kerjasama itupun sangat strategis bila kita menjalin dengan kawan paling dekat kita secara geografis.

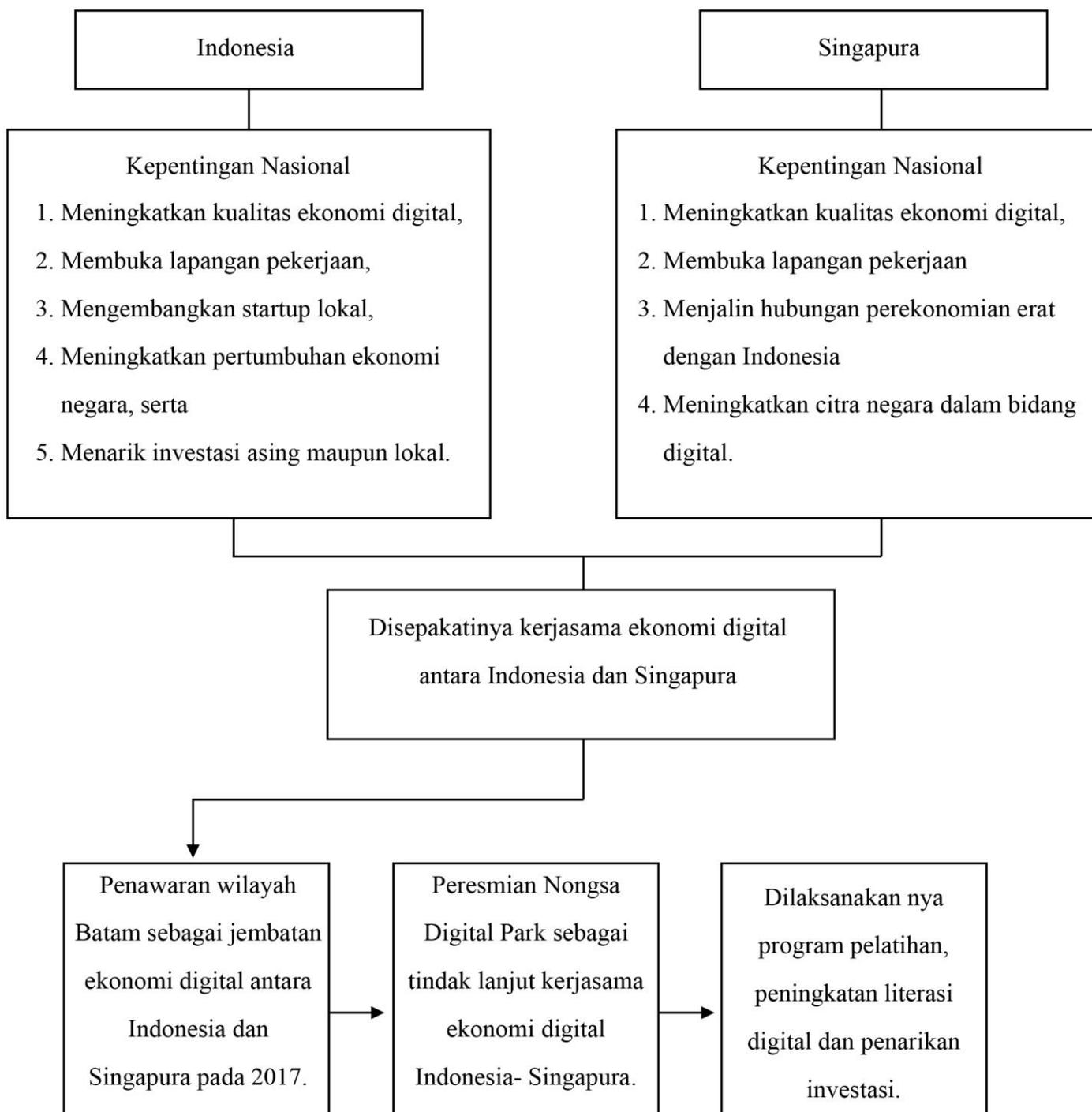
Singapura merupakan salahsatu negara terdekat yang dimiliki Indonesia, sehingga menjadi salahsatu faktor keekatan hubungan antar negara. Namun tidak hanya faktor geografis, kedua negarapun memiliki jejak historis yang baik. Hubungan kedua negara pun sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya organisasi regional Asia Tenggara, yaitu ASEAN juga karena kedua negara ini merupakan salahsatu pendiri dari organisasi tersebut.

Di era globalisasi ini, peran pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur dan juga sumber daya manusia sangat diperlukan bagi persaingan global yang terjadi. Peningkatan kualitas dari kedua unsur tersebut pun dapat dilakukan dengan dibentuknya kerjasama. Kita dihadapkan pada masa dimana industri apapun memanfaatkan teknologi internet dan digital.

Program kerjasama antara Indonesia dan Singapura di bidang pelatihan ekonomi digital ini berfokus pada hal literasi dan relevansi akademik, yang ditujukan untuk para tenaga ahli atau dosen dari universitas atau politeknik negeri yang ada di Indonesia. Kerjasama yang terjalin selama 3 tahun ini lebih mengarahkan bidang akademik sebagai penunjang berkembangnya kualitas teknologi informasi yang diterapkan dalam bidang digital.

Selain itu, terjalin juga hubungan antara Indonesia dan Singapura di Nongsa Digital Park yang diarahkan menjadi tempat penerapan ilmu-ilmu dari pelatihan tersebut, pembuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dan juga menyiapkan masyarakat Indonesia terhadap persaingan didunia digital. Dengan merangkul perusahaan-perusahaan digital dari masing-masing negara, pertukaran teknologi, ide, dan kreativitas dapat terjadi dalam ekosistem ini. Selain itu, menjadi suatu daya tarik tersendiri pula bagi wilayah Nongsa, Batam.

Secara singkat, kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada bagan kerangka penelitian dibawah ini :



**Gambar 2.1**

Bagan Kerangka Pemikiran